TINJAUAN HUKUM ATAS MODERNISASI BERAGAMA DAN KEBHINEKAAN DALAM HARMONISASI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PADA SISTEM KEWARISAN *MATRILINEAL*

Dina Mary^{1*}, Yusrizal Sikumbang²

¹Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, ²Ikatan Notaris Indonesia

Kata Kunci:

Tinjauan Hukum, Modernisasi Beragama, Kebhinekaan, Harmonisasi Putusan Hakim, Pengadilan Agama, Sistem Kewarisan *Matrilineal*.

***Correspondence Address:**

dinamarypasaribu@dharmawangsa.ac.id

Abstrak: Indonesia, sebagai negara yang kaya dengan keanekaragaman berbagai budaya dan agama, cenderung menghadapi kesulitan dalam mengharmonisasikan hukum Islam dan hukum tradisional dalam sistem pembagian warisan, terutama di kalangan masyarakat yang mengikuti sistem *matrilineal*. Hukum Islam, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur distribusi warisan berdasarkan prinsip faraidh, yang seringkali bertolak belakang dengan nilai-nilai tradisi *matrilineal* yang menekankan garis keturunan perempuan. Perbedaan ini sering memicu perselisihan hukum dan sosial, sehingga memerlukan usaha untuk menyelaraskan penerapan hukum. Kontribusi Pengadilan Agama dalam membuat keputusan yang bersifat moderat, yang tidak hanya berdasarkan pada syariat Islam tetapi juga memperhatikan nilai-nilai tradisional untuk mencapai keadilan yang substansial. Menyoroti pentingnya modernisasi agama dalam konteks pluralisme hukum, dengan menekankan pendekatan yang inklusif dan adaptif terhadap keragaman budaya Indonesia.

Penyelarasan hukum dapat dilakukan melalui penggabungan prinsip-prinsip syariah dengan kearifan lokal, yang didukung oleh musyawarah keluarga, serta adanya perbaikan dalam regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam. Upaya ini sangat penting untuk mempertahankan keutuhan kebhinekaan dan mewujudkan modernisasi beragama dalam penerapan hukum di Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia diakui sebagai negara maritim dengan kekayaan beragam budaya, keyakinan, dan sistem hukum. Keanekaragaman ini bukan hanya merupakan identitas bangsa, namun juga menimbulkan tantangan dalam mempertahankan keharmonisan sosial. Salah satu bentuk yang mencerminkan kompleksitas ini

adalah pembagian warisan di antara komunitas yang mengikuti sistem *matrilineal*. Sistem ini, yang diimplementasikan oleh komunitas yang menganut garis keturunan *matrilineal*, bertentangan dengan prinsip faraidh dalam hukum Islam yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hukum Islam menetapkan pembagian warisan yang berbeda bagi pria dan wanita sesuai dengan aturan syariat, sedangkan hukum adat *matrilineal* lebih mengutamakan perempuan sebagai penerus yang bertanggung jawab atas harta warisan dalam keluarga. Ketidaksesuaian ini sering kali menciptakan masalah hukum dan konflik sosial, terutama saat sengketa warisan dibawa ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini, peran hakim di Pengadilan Agama sangat krusial untuk menyelaraskan kedua sistem hukum demi mencapai keadilan yang adil. (Benny Suryanto 2023)

Modernisasi agama merupakan cara yang tepat untuk menghadapi berbagai tantangan ini. Sebagai upaya untuk memperbarui pemahaman keagamaan yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya, modernisasi agama memberikan solusi untuk menyatukan prinsip-prinsip syariah dengan nilai-nilai lokal. Ini juga sejalan dengan semangat untuk mempertahankan keanekaragaman, di mana semua sistem hukum, baik itu yang berbasis islam maupun hukum adat, bisa berjalan bersamaan tanpa bertentangan satu sama lain.

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai cara mewujudkan modernisasi dalam beragama dan keberagaman melalui penyesuaian keputusan hakim di Pengadilan Agama terkait pembagian warisan dalam sistem *matrilineal*. Dengan mengadopsi pendekatan hukum yang terbuka dan menerima, penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran yang dapat diterapkan untuk mengatasi konflik hukum di Indonesia sekaligus memelihara keseimbangan sosial. Berdasarkan uraian di atas, maka untuk itu akan membahas dengan judul TINJAUAN HUKUM ATAS MODERNISASI BERAGAMA DAN KEBHINEKAAN DALAM HARMONISASI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PADA SISTEM KEWARISAN *MATRILINEAL*

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mengatasi konflik yang terjadi antara penerapan hukum islam dan sistem kewarisan *matrilineal*

2. Bagaimana menghadapi tantangan dalam menjaga modernisasi beragama serta mempertahankan keutuhan kebhinekaan di tengah adanya konflik dalam kewarisan terutama dalam penegakan hukum islam

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian harta warisan pada masyarakat yang menganut sistem *matrilineal*. Metode ini dipilih untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip syariah, serta praktik hukum adat, sekaligus mengaitkannya dengan modernisasi beragama dan keutuhan kebhinekaan.

Metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan dan bahan-bahan hukum (peraturan perundang-undangan, teori hukum, literatur hukum) untuk menganalisis norma-norma hukum secara deskriptif dan interpretatif, tanpa mengandalkan data numerik. Pendekatan kualitatif dalam hal ini berarti analisis data dan kesimpulan yang dihasilkan bersifat naratif, bukan angka-angka. (Soekanto 2014)

Dua jenis sumber data yang dipakai adalah Sumber Data Primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang memakai sistem *matrilineal* sebagai perwakilan sistem *matrilineal*, untuk bisa memahami praktik waris adat, sedangkan sumber data sekunder di sini diperoleh dari literature ataupun buku yang membahas hukum waris dalam islam, meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen putusan Pengadilan Agama terkait pembagian harta warisan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis dokumen, meninjau literatur secara kritis, dan melakukan wawancara mendalam tentang praktik warisan budaya. Penganalisisan informasi dilakukan dengan menggunakan teknik analisis konten untuk mengevaluasi dampak dari nilai-nilai modernisasi beragama yang muncul dalam penerapan budaya warisan. Penulis juga melakukan reduksi informasi, presentasi data, dan penarikan kesimpulan untuk memahami dan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem kekerabatan *matrilineal* berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat dalam menerapkan tradisi dalam garis keturunan. Keturunan ini dikenal sebagai *matrilineal*, yaitu sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan dari ibu. Selain itu, masyarakat yang memakai sistem *matrilineal* terpengaruh oleh dua kekuatan yang berjalan bersamaan, yaitu adat dan agama. Kedua aspek ini memiliki nilai-nilai yang dikenal sebagai hukum, yang mengharuskan masyarakat yang memakai sistem *matrilineal* untuk menunjukkan tingkat kesetiaan yang tinggi, yakni taat kepada agama sebagai seorang muslim dan mengikuti adat sebagai bagian dari masyarakat yang memakai sistem *matrilineal*.(Cindy Aoslavia 2021)

Prinsip adat di sini adalah adat yang berdasarkan syarak yang berlandaskan kitabullah. Oleh karena itu, setiap peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang memakai sistem *matrilineal* harus sejalan dengan syariat islam, dan selanjutnya, peraturan tersebut akan dituangkan dalam hukum adat. Semua peraturan adat wajib sesuai dengan syariat islam, termasuk di dalamnya adalah aturan mengenai warisan. Selain mengikuti ketentuan adat, hukum waris juga harus sejalan dengan ketentuan hukum waris dalam syariat Islam, yang dikenal sebagai hukum waris Islam (*faraidh*). (Lubis dan Rabiatul Abawiyah 2023)

Konflik antara Hukum Islam dan Sistem *Matrilineal*

Konflik antara hukum islam dan sistem *matrilineal* dapat muncul dalam berbagai aspek, terutama dalam hal warisan, pernikahan, dan posisi perempuan. Meskipun masyarakat yang memakai sistem *matrilineal* sering melihat bahwa sistem *matrilineal* bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang patrilineal, penelitian mengungkapkan bahwa tidak ada pertentangan mendasar antara keduanya. Hukum islam memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi berbagai praktik adat, seperti dalam sistem distribusi harta yang membedakan antara pusaka tinggi dan pusaka rendah, yang sejatinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam sistem *matrilineal*, di mana keturunan dan harta diwariskan melalui garis ibu, sering kali berbeda dengan hukum waris Islam yang mengikuti garis ayah. Namun, dalam praktiknya, hukum Islam memberikan kesempatan untuk

mendukung sistem keturunan melalui garis wanita, terutama terkait dengan pembagian warisan besar dan kecil, di mana warisan besar umumnya diberikan kepada wanita.(Tarmizi dan Zubair 2023)

Dan dalam tradisi yang memakai sistem *matrilineal* yang menganut sistem keturunan melalui ibu, wanita memiliki peran serta posisi yang signifikan. Wanita merupakan penentu asal usul keturunan, pemilik dan pengelola harta warisan, serta memiliki peran sebagai *Bundo Kandung* yang memimpin dan melindungi para wanita dalam komunitasnya. Sistem kekerabatan yang berlandaskan garis ibu pada masyarakat adat yang memakai sistem *matrilineal* memberikan dampak besar terhadap posisi sosial wanita. Perempuan sistem *matrilineal* memiliki peranan yang kokoh dalam keluarga dan komunitas karena mereka merupakan penentu garis keturunan serta ahli waris harta warisan. Mereka juga memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan adat dan berhak atas aset.(Herman 2022)

Sedangkan dalam hal kewarisan budaya pada masyarakat yang memakai sistem *matrilineal* terkait dengan kepemilikan aset, memiliki prinsip kolektif atau komunal yang menunjukkan bahwa harta dimiliki secara bersama. Aset warisan dimiliki oleh kaum secara kolektif, bukan oleh individu secara terpisah. Sementara itu, kewarisan menurut Islam mengikuti prinsip individual, yang berarti setiap orang berhak untuk memilikinya secara pribadi tanpa terikat pada orang lain.(Lubis dan Rabiatul Abawiyah 2023)

Dalam menjalankan sistem waris, masyarakat yang menerapkan sistem *matrilineal* telah menjalankan harmonisasi dengan hukum Islam tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional yang ada, khususnya yang berkaitan dengan isu pewarisan harta pusaka yang sedikit atau harta hasil dari usaha dalam komunitas adat yang mengadopsi sistem warisan sesuai dengan hukum Islam (*faraaidh*). (Benny Suryanto 2023)

Sementara itu, untuk harta warisan pusaka tinggi, sistem pembagian warisan menurut faraidh tidak diterapkan, karena harta yang bernilai tinggi tidak termasuk dalam kategori *Milk al-Raqabah* yang merupakan jenis kepemilikan yang memisahkan hak kepemilikan atas benda dari hak untuk memanfaatkannya. Hal ini memungkinkan adanya berbagai pengaturan kepemilikan yang lebih fleksibel untuk diwariskan sesuai dengan hukum Islam, sehingga tidak bisa dianggap

sebagai faraidh. Namun, jika seseorang mewariskan harta pusaka tinggi milik komunitasnya kepada anaknya dengan persetujuan seluruh anggota komunitas, dengan tujuan untuk diwariskan karena anggota komunitas tersebut sudah tidak ada, maka ini dapat dianggap sebagai bentuk pewarisan sesuai dengan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.(Suprianik, 2023)

Menghadapi konflik yang muncul terkait penerapan warisan dalam sistem *matrilineal* dan menegakkan hukum Islam, seorang hakim dalam mengambil keputusan mengenai masalah warisan perlu menekankan keadilan dalam pelaksanaan warisan Islam, tanpa mendukung sistem *matrilineal* atau sistem lainnya. Penyelesaian konflik yang terjadi harus dilakukan dengan cara yang adil, menyeluruh, dan dengan pemahaman yang mendalam mengenai hukum warisan Islam.

Dalam upaya menghindari sengketa waris merupakan tujuan utama dalam pembagian harta warisan dalam putusan hakim pada Pengadilan Agama. Untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan, penting untuk memiliki komunikasi yang jelas dan terbuka dalam pembagian harta warisan. Semua ahli waris harus terlibat dalam proses ini, terutama jika ada wasiat yang harus diperhatikan.

Tantangan dalam Menjaga Modernisasi Beragama dan Keutuhan Kebhinekaan di Tengah Konflik Warisan

Tantangan dalam mempertahankan modernisasi beragama dan persatuan kebhinekaan di tengah warisan konflik melibatkan pemahaman yang ekstrem dan radikal, ketidakadilan, diskriminasi, serta pergeseran nilai budaya akibat modernisasi. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan pendidikan mengenai nilai-nilai toleransi, dialog antar agama, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang keberagaman budaya.

Modernisasi dalam beragama merupakan sebuah ide yang sangat krusial di Indonesia, yang didukung oleh variasi budaya, agama, bahasa, dan tradisi. Sasaran utamanya adalah untuk mencegah potensi terjadinya konflik dan diskriminasi berdasarkan ras. Ide ini diperkuat melalui beberapa indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, salah satunya adalah komitmen pada kebangsaan sebagai fondasi utama. Ini mencakup rasa cinta terhadap tanah air dan pengakuan pada prinsip-prinsip negara, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka

Tunggal Ika, serta asas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, toleransi juga menjadi elemen yang sangat esensial dalam modernisasi beragama, di mana sangat penting untuk menghargai perbedaan dan tidak menganggap kebenaran sebagai hak eksklusif. Menghormati keberagaman menjadi dasar dalam memperkuat persatuan bangsa, yang memberikan pelajaran penting tentang toleransi di tengah perbedaan sambil tetap menjaga prinsip-prinsip keagamaan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmoni. (Marsaulina dan Bala 2024)

Dalam cara pandang modernisasi beragama, sangat penting untuk memahami konteks bahwa yang dimaksud adalah pengertian dalam beragama, mengingat Indonesia memiliki keberagaman yang banyak. Unsur keragaman dalam beragama di Indonesia adalah suatu hal yang perlu diakui dan tidak dapat dihapus. Modernisasi beragama berfungsi untuk memperkuat kesamaan, bukan sebagai sarana untuk mendalami perbedaan. Setiap agama tentu memiliki tujuan untuk menjalani kehidupan yang aman dan damai serta mengajarkan keseimbangan dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, modernisasi dalam beragama hadir sebagai suatu cara dalam melaksanakan praktik agama agar sejalan dengan inti dari kehidupan yang menghargai martabat dan kehormatan setiap orang. (ifa 2022)

Modernisasi dalam beragama bisa dipahami sebagai kemampuan untuk beradaptasi dan bersikap fleksibel. Paham Islam yang moderat berusaha untuk menyesuaikan diri dan berkompromi dengan keadaan nyata di masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar agama. Dengan demikian, salah satu bentuk nyata dari modernisasi beragama adalah mengutamakan penghargaan terhadap kepercayaan dan budaya lain, bersikap toleran, tidak ekstrem, tidak anarkis, serta mau menerima perbedaan sembari tetap percaya pada kebenaran ajaran agama sendiri.

Peningkatan pemahaman digital dan nilai-nilai agama adalah hal yang sangat penting untuk mengatasi informasi yang salah atau disinformasi di zaman digital. Pemahaman digital adalah kemampuan seseorang untuk mencari, memahami, menilai, dan menerapkan informasi yang diperoleh dari dunia digital dengan cara yang bijaksana. Ketika berhadapan dengan informasi yang salah atau tidak benar mengenai modernisasi dalam beragama di era digital, pemahaman digital sangatlah

diperlukan. Oleh karena itu, pengembangan literasi digital memiliki tujuan untuk memperkuat modernisasi beragama yang lebih baik.(Ulfa 2024)

Dalam konteks ini, kemampuan literasi digital membantu orang untuk mengidentifikasi adanya bias atau representasi dalam informasi yang mereka terima. Mereka diajarkan untuk mencari perspektif yang berbeda serta mencari informasi yang objektif sebelum membentuk pendapat. Literasi digital memungkinkan orang untuk memanfaatkan alat penyaring konten dengan efektif. Mereka bisa mengatur preferensi dan mengurangi paparan terhadap konten yang berpotensi menyesatkan atau meragukan. Dengan literasi digital, orang dapat berkontribusi dalam penyebaran konten yang positif dan modernisasi dalam beragama di media sosial serta platform daring. Literasi digital juga memiliki peran dalam menyebarkan pesan-pesan damai dan toleransi, guna mengimbangi informasi yang tidak akurat atau berbahaya. Di sisi lain, literasi agama mencakup pemahaman yang mendalam tentang keyakinan, praktik, serta nilai-nilai dari agama tertentu.

KESIMPULAN

Dalam situasi masyarakat Indonesia yang kaya akan beragam budaya, berinteraksi dengan berbagai kelompok adalah sebuah keharusan dan juga kesempatan untuk merasakan persatuan rakyat Indonesia. Dilihat dari sudut pandang agama, meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, mereka tetap memerlukan hubungan dengan penganut agama lain yang diakui di negara ini. Sebagai seorang muslim, penting bagi kita untuk memahami posisi para pemeluk agama yang berbeda.

Melihat kondisi masyarakat yang mayoritas beragama Islam, hal ini bisa dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk menanamkan nilai-nilai modernisasi dalam beragama. Ketika kita mengadopsi sikap moderat dalam beragama, kehidupan umat beragama dan masyarakat secara keseluruhan akan menjadi lebih baik, aman, damai, dan harmonis. Kewarisan menurut hukum adat dalam distribusi harta waris tidak memiliki batasan yang jelas. Harta akan dibagikan secara adil kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh orang tua mereka semasa hidup. Ahli waris juga berhak mendapatkan bagian yang telah ditentukan oleh orang tua mereka setelah mereka meninggal.

Al-Qur'an telah menguraikan dengan jelas dan tuntas mengenai peraturan waris dalam Islam serta ketentuan-ketentuannya untuk setiap pewaris, tanpa mengabaikan hak seseorang atau membatasi harta yang akan diwariskan. Aturan Islam telah dicantumkan ke dalam berbagai aspek hukum yang mengatur umat Muslim di Republik Indonesia, seperti halnya dalam Perkawinan, Hibah, Wakaf, dan sebagainya. Namun, tidak semua tradisi yang dijalankan oleh masyarakat sudah sejalan dengan kaidah atau prinsip yang tercantum dalam hukum Islam.

Antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian harta warisan pada sistem *matrilineal* merupakan tantangan sekaligus peluang untuk mewujudkan keadilan hukum di Indonesia. Modernisasi beragama, yang menekankan inklusivitas dan fleksibilitas hukum, memberikan landasan untuk mengintegrasikan prinsip syariah dengan kearifan lokal. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama memiliki peran strategis sebagai penghubung antara norma agama dan adat demi menjaga keutuhan kebhinekaan.

REFERENSI

- Benny Suryanto. 2023. "Hukum Kewarisan Adat *Matrilineal* : Eksistensi dan Pergeseran."
- Cindy Aoslavia. 2021. "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10: 54–63.
- Herman, Mimi. 2022. "Kajian Teoritis Bundo Kandung Simbol Kesetaraan Gender Berdasarkan Islam Dan Minangkabau." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 21(2): 93.
- ifa. 2022. "Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Modernisasi Beragama." *Modernisasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural* 6: 4.500-5000.
- Lubis, Rika Febri Anti, dan Rabiatal Abawiyah. 2023. "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Al Qadhi* 1(2): 166–79.
- Marsaulina, Putri Citra, dan Herald Claren Bala. 2024. "Tantangan dalam Penerapan Praktik Waris Adat dengan Pendekatan Modernisasi Beragama." *Syariah: Jurnal Hukum Islam* 1(2): 316–21.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan 3. Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia.

- Suprianik, Khairunnisa Musari, Herman Cahyo Diartho, Ana Pratiwi, Mochamad Rizal Umami, M. Iqbal Fardian, Attori Alfi Shahrin, Yazidul Fawaid, Ahmad Raziqi, Hikmatul Hasanah, Ahmad Fadli, Nadia Azalia Putri, Nurul Setianingrum, Nikmatul Masruroh. 2023. "Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam Konsep Hak Milik Dalam Ekonomi Islam." 5(1): 114–30.
- Tarmizi, Tarmizi, dan Asni Zubair. 2023. "Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4(2): 131–47.
- Ulfa, Maulida. 2024. "Maintaining Religious Moderation in the Digital Age: Challenges and Strategies for Facing Technology." *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 3(1): 43–63. Dikutip dari : <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS>, tanggal 20 Mei 2025